

ABSTRAK

EVALUASI PROGRAM GERAKAN PENGUATAN PRODUKSI PERTANIAN UNTUK KETAHANAN PANGAN (GP3K) OLEH PERUM BULOG DIVRE LAMPUNG

oleh

Risky Arfiyanto

Kondisi ketahanan pangan di Indonesia menunjukkan keadaan yang tidak stabil dikarenakan kurangnya hasil produksi pertanian. Salah satu upaya untuk menguatkan ketahanan pangan di Indonesia dilakukan melalui program GP3K (Gerakan Penguatan Produksi Pertanian untuk Ketahanan Pangan) yang ditujukan untuk meningkatkan produksi pangan. Masalah yang sering terjadi di Provinsi Lampung yaitu mahalnya harga bahan padi. Para petani pada sejumlah desa di Provinsi Lampung mengeluhkan tingginya harga benih (bibit) padi yang akan mereka tanam di lahan sawah musim hujan (rendeng) awal tahun 2013. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran pelaksanaan Program Gerakan Penguatan Produksi Pertanian untuk Ketahanan Pangan (Program GP3K) oleh Perum Bulog Divre Lampung, sedangkan tujuan program GP3K yaitu dari program *On Farm* ini adalah untuk membuka akses pembelian langsung ke petani/kelompok tani/gapoktan, mendukung penyediaan pasokan gabah/beras, baik untuk PSO (*Public Service Obligation*) maupun komersial serta mengembangkan usaha untuk memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Metode penelitian ini yaitu penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif menggunakan fokus penelitian efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas dan ketepatan, Penelitian ini dilaksanakan di Perum Bulog Divre Lampung dan Poktan Taruna Tani Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu.

Berdasarkan penelitian ditemukan bahwa: Program GP3K Perum Bulog Divre Lampung yang di selenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Lampung sudah efektif karena telah membuka akses pembelian langsung ke petani serta mengembangkan hasil produksi pertanian untuk memajukan kesejahteraan petani. Efisiensi program GP3K berhubungan dengan mekanisme atau cara. Pada program ini, mekanisme pemberian dana program GP3K yaitu melalui rekening dari Perum Bulog Pusat

kepada Perum Bulog Divre Lampung kemudian dilimpahkan ke pihak Poktan Taruna Tani atas sepengetahuan pengurus Poktan Taruna Tani untuk dikelola dengan pedoman RDKO yang telah ditetapkan. Indikator kecukupan program GP3K yaitu dengan adanya program GP3K Perum Bulog ini dapat membantu menaikkan indeks partisipasi masyarakat untuk pemenuhan pasokan beras/gabah. Pada indikator perataan yaitu belum merata, karena kebutuhan setiap kelompok tani di Provinsi Lampung berbeda-beda dilihat dari jumlah anggota, jumlah lahan, serta keadaan demografi poktan yang berbeda-beda. Sehingga dana Program GP3K yang diberikan kepada masing-masing Poktan berbeda disesuaikan dengan kebutuhan Poktan. Indikator Responsivitas pada penyelenggaraan program GP3K sudah baik, karena hasil yang dirasakan oleh masyarakat yaitu merasa terbantu dengan adanya program GP3K di Poktan Taruna Tani. Contoh hasil yang didapat petani yaitu petani lebih mudah mendapatkan benih dan pupuk serta kualitas hasil produksi menjadi lebih baik. Sehingga para petani sangat antusias terhadap program ini. Pada indikator ketepatan menurut peneliti belum tepat, karena program ini memfokuskan kepada petani yang memiliki lahan, sedangkan pada kenyataannya pemilik lahan masih banyak yang bukan berprofesi sebagai petani. Karena para petani yang menggarap lahan masih banyak yang tidak memiliki lahan pertanian milik pribadi. Masalah lainnya yaitu keterlambatan penyaluran dana GP3K masih menjadi kendala bagi tercapainya sasaran.

Adapun saran tersebut sebagai berikut: (1) Pemerintah sebaiknya bisa mengawasi program GP3K yang diselenggarakan supaya tidak terjadi penyelewengan dalam merealisasikan dana GP3K yang dikelola Poktan. (2) Pemerintah harus mengawasi penyaluran dana GP3K, mulai pendataan hingga penyalurannya, dalam hal ini pengurus Poktan, tim manajemen Perum Bulog Subdivre dan Divre Lampung, supaya penyaluran dana GP3K bisa berjalan efisien. (3) Pemerintah dan Perum Bulog Divre Lampung sebaiknya bisa meningkatkan program dalam bidang pertanian supaya kualitas pertanian di Provinsi Lampung dapat terus meningkat untuk tahun-tahun berikutnya. (4) Perum Bulog Divre Lampung seharusnya menjalankan perannya dengan baik dalam membuat Rencana Definitif Kebutuhan *On Farm*. Karena setiap Poktan memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, sehingga membutuhkan dana program yang berbeda. (5) Pihak Poktan sebaiknya selalu berkomunikasi dengan Perum Bulog dalam mengalokasikan anggaran GP3K untuk hal-hal yang telah menjadi prioritas yang sudah tertera dalam RDKO. Kerjasama Perum Bulog Divre Lampung dengan pihak Subdivre dan Kansilog Perum Bulog lebih ditingkatkan lagi pada faktor komunikasi, sehingga keterlambatan pengiriman dana tidak terulang kembali. (6) Seharusnya pemerintah dalam membuat dan melaksanakan kebijakan lebih baik melihat terlebih dahulu latar belakang petani anggota Poktan apakah sebagai pemilik atau hanya sebagai pekerja. Sehingga tujuan dalam mensejahterakan petani dapat lebih tercapai.

Kata Kunci : Evaluasi Program, Ketahanan Pangan, Bulog